

**SINERGITAS PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DI KAWASAN KASULTANAN BANTEN KOTA SERANG**

**SYNERGY OF STAKEHOLDERS IN THE FRAMEWORK OF
CREATIVE ECONOMY DEVELOPMENT IN THE SULTANATE OF
BANTEN, SERANG CITY**

Yedi Rusyadi*, Ipah Ema Jumiati, Rina Yulianti

Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Administrasi Publik Pasca Sarjana
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Jakarta KM. 04. Pakupatan Serang, Banten, Indonesia

*E-mail:yedirusyadi@yahoo.com

disubmit: 14 Juli 2022, direvisi: 18 September 2022, diterima: 10 Oktober 2022

ABSTRAK

Minimnya *creative center*, rendahnya kualitas SDM kreatif, regulasi yang kurang mendukung, lemahnya akses permodalan dan lemahnya metode distribusi pemasaran merupakan hambatan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sinergitas pemangku kepentingan melalui prinsip koordinasi efektif yang dibangun dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang. Koordinasi diantara fungsi pemangku kepentingan yang berbeda merupakan hal penting dalam membangun sinergitas. Oleh karena itu, sinergitas pemangku kepentingan dapat ditinjau melalui beberapa prinsip koordinasi efektif diantaranya koordinasi melalui kontak langsung, koordinasi pada tahap awal, koordinasi sebagai hubungan timbal balik dan koordinasi sebagai proses berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan menganalisa hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan tidak dapat menjalankan peran koordinasi yang efektif. Kondisi ini mencerminkan bahwa sinergitas yang dibangun diantar pemangku kepentingan dalam kerangka pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang belum berjalan secara optimal.

Kata kunci: *Ekonomi Kreatif, Pemangku Kepentingan, Sinergitas*

ABSTRACT

The lack of creative centers, the low quality of creative human resources, unsupportive regulations, weak access to capital and weak marketing distribution methods are obstacles to the development of the creative economy. The purpose of this study was to analyze the synergy of stakeholders through the principle of effective coordination which was built in an effort to develop the creative economy in the Banten Sultanate Region, Serang City. Coordination between different stakeholder functions is important in building synergy. Therefore, the synergy of stakeholders can be reviewed through several principles of effective coordination, including coordination through direct contact, coordination in the early stages, coordination as a reciprocal relationship and coordination as a continuous process. The study used descriptive methods through a qualitative approach by analyzing the results of interviews and secondary data obtained from the results of the literature study. The results of the study indicate that stakeholders cannot carry out an effective coordinating role. This condition reflects that the synergy built between stakeholders in the framework of developing the creative economy in the Banten Sultanate Area, Serang City has not run optimally.

Keywords: *Creative Economy, Stakeholders, Synergy*

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia yang sangat besar, sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya hasil budaya yang beragam merupakan tiga faktor penggerak ekonomi bagi sebuah negara. Ketiga faktor tersebut dapat menjadi kekuatan dalam rangka menumbuhkan perekonomian dibidang kreatif suatu negara. Ekonomi kreatif tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga memajukan aspek-aspek non ekonomi, berbangsa dan bernegara dalam hal memajukan citra dan identitas bangsa, mengembangkan sumber daya yang terbarukan, dan mempercepat pertumbuhan inovasi dan kreativitas dalam negeri. Dampak pengembangan ekonomi kreatif akan mempengaruhi keadaan sosial masyarakat, kualitas hidup masyarakat dan perbaikan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif menurut Provinsi Asal (2012-2015)

No	Prov	Nilai FOB (Juta US \$)		Peran thd Ekspor Nasional 2015	Perubahan 2015 thd 2014 (%)
		2014	2015		
1	Jabar	6 559,1	6 499,2	33,56	-0,91
2	Jatim	3 237,7	4 037,4	20,85	24,70
3	Banten	2 921,7	3 033,2	15,66	3,81

Sumber: Badan Ekonomi Kreatif dan BPS (2017)

Kreativitas akan mendorong dihasilkannya produk dan jasa yang inovatif dan bernilai tambah tinggi

sehingga kelak Indonesia tidak akan lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi juga akan mampu mengekspor produk yang bernilai tambah tinggi. Kreativitas dan inovasi juga akan menjadikan warisan budaya dan kearifan lokal berkontribusi besar tidak hanya bagi perekonomian nasional namun juga bagi peningkatan citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional (Setyadi, 2020).

Kontibusi ekspor ekonomi kreatif secara nasional, Provinsi Banten pada tahun 2015 menempati urutan ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa timur. Provinsi Banten mengalami pertumbuhan nilai ekspor ekonomi kreatif pada tahun 2015 dibanding tahun 2014, yaitu sebesar 3,81 persen. Provinsi Banten pada tahun 2015 secara total nilai ekspor ekonomi kreatif Banten mencapai US \$ 3,03 miliar atau setara dengan 15,66 persen terhadap kontribusi keseluruhan ekspor Ekonomi Kreatif Indonesia. Nilai ekspor ekonomi kreatif Provinsi Banten berdasarkan sub sektor pada tahun 2012 sampai dengan 2015 secara pertumbuhan didominasi oleh lima sub sektor diantaranya: sub sektor kriya, kuliner, fashion, penerbitan dan sub sektor seni rupa. Namun. dalam perjalanannya, perkembangan ekonomi kreatif di Kota Serang menemui berbagai persoalan pelik pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang dasarkan pada usaha mikro kecil tidak lah dapat berdiri sendiri,

dibutuhkan sektor lain sebagai *key driver* (penggerak) pertumbuhan usaha ekonomi kreatif tersebut.

Kawasan Kesultanan Banten Lama mempunyai *history value* yang sangat tinggi. Sebagai *icon* sejarah Provinsi Banten yang diyakini mampu menyumbang pendapatan daerah yang cukup signifikan dengan banyaknya kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut. Oleh karena itu, strategi pengembangan ekonomi kreatif melalui sektor pariwisata, akan merangsang kreativitas untuk menciptakan produk-produk inovatif yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing yang lebih baik dari kompetitor tujuan wisata di daerah lainnya. Pada sisi lainnya, wisatawan akan merasa lebih mempunyai ketertarikan untuk berkunjung ke daerah wisata yang memiliki produk khas yang menarik untuk menjadi media memorabilia dan souvenir.

Kelemahan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Serang yang menjadi sorotan diantaranya; *pertama*, Pemerintah daerah Kota Serang harus mampu menciptakan suatu kebijakan publik (regulasi) yang mempunyai keberpihakan terhadap pelaku ekonomi kreatif. Perencanaan dan implementasi program yang dicanangkan seyogyanya dapat membantu mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif sehingga hasil produknya

dapat memiliki *added value* dan berakibat efek ganda bagi perekonomian daerah. *Kedua*, Wujud ide kreatif-inovatif masyarakat yang menghasilkan produk-produk kreatif bernilai ekonomi belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat pelaku ekonomi kreatif. Rendahnya daya saing produk kreatif memerlukan kehadiran pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif melalui berbagai bentuk pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan manajerial sehingga dapat menghasilkan produk-produk atau karya ekonomi kreatif yang berkualitas dan bernilai tinggi. *Ketiga*, minimnya sarana prasarana serta fasilitas bagi kelas kreatif (*creative center*), minimnya akses pembiayaan (permodalan) yang disebabkan belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik ekonomi kreatif yang umumnya belum *bankable*, *high risk high return*, *cash flow* yang *fluktuatif*, serta aset yang bersifat *intangible*, serta lemahnya metode pemasaran dan distribusi produk dan jasa kreatif yang semakin dekat dengan konsumen serta belum terjangkaunya teknologi informasi yang dapat mendorong konsumen semakin mudah mendapatkan produk dan jasa kreatif.

Sinergitas pemangku kepentingan sebagai sebuah basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan

implementasi program Pemerintah. Maka sinergitas antar pemangku kepentingan merupakan keniscayaan dalam rangka upaya pengembangan ekonomi kreatif yang bersanding dengan kerangka pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang. Konsep sinergi membutuhkan integrasi atau koordinasi di antara fungsi dan bisnis yang berbeda dari portofolio perusahaan, sehingga struktur organisasi, mekanisme koordinasi, dan sistem perusahaan semuanya merupakan isu penting (Campbell Andrew & Kathleen Summers Luchs, 1998).

Tabel 2. Perkembangan Wisatawan ke Kawasan Kasultanan Banten Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Wisatawan		Total
		Wisnus	Wisman	
1	2017	563.373	4	563.377
2	2018	1.570.640	-	1.570.640
3	2019	10.205.634	-	10.205.634
4	2020	10.991.123	-	10.991.123
5	2021	1.966.236	-	1.966.236

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Banten (2021)

Koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (Stoner, 1986). Marry Parker Follett menjelaskan terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan dalam pelaksanaan koordinasi yang lebih baik (Fox, 1982), yaitu:

1. Koordinasi melalui kontak langsung dari orang yang mempunyai tanggung jawab terkait (*coordination by direct contact of the responsible people concerned*);
2. Koordinasi pada tahap awal (*coordination in the early stages*);
3. Koordinasi sebagai hubungan timbal balik dari semua faktor dalam suatu situasi (*coordination as the reciprocal relating of all the factors in a situation*);
4. Koordinasi sebagai proses berkelanjutan (*coordination as a continuing process*);

Komunikasi sebagai titik pusat kekuatan menyatukan sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan karenanya akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir. Kunci untuk koordinasi yang efektif adalah dilakukannya komunikasi (Stoner, 1986).

Berdasarkan pada fakta dan fenomena yang telah penulis deskripsikan sebelumnya, maka persoalan mengenai sinergitas pemangku kepentingan memiliki urgensi yang penting untuk dilakukan kajian secara lebih mendalam dalam kerangka pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Kesultanan Banten.

Dari berbagai penelitian terdahulu mengenai sinergitas pemangku kepentingan yang dilakukan oleh Akbar Pandu Dwinugraha yang berjudul

Sinergitas Aktor Kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang) (Dwinugraha, 2017), penelitian ini mengidentifikasi sinergitas sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar (Hayati, 2014). Menelisik sinergitas aktor kepentingan dari aspek efektivitas koordinasi melalui 6 sub konsep yaitu. hubungan langsung, perencanaan awal, keberlanjutan, kedinamisan, tujuan yang jelas dan perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Selanjutnya penelitian Nafizah Hayati yang berjudul Sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan / BUMN dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda (Hayati, 2014), penelitian mendeskripsikan bagaimana sinergi antara pemangku kepentingan lembaga pemerintah/BUMN dalam rangka penyaluran bantuan PKH di Kota Samarinda. Peneliti ini berupaya untuk memahami kondisi lembaga pemerintahan/BUMN yang bersinergi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kota adalah Dinas Kesejahteraan Sosial dan PT. Pos Indonesia. Konsep yang dipakai dari Stephen R. Covey yang menyatakan bahwa sinergi (*synergy*)

adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian (Covey, 2004). Sinergi merupakan suatu kerjasama yang dapat terwujud ketika kita bisa mensinkronkan bermacam alternatif keinginan dengan cara komunikasi yang baik antar anggota tim. Dalam bersinergi, harus berkoordinasi satu sama lain sehingga terwujudnya suatu kegiatan yang efisien. Koordinasi merupakan penyaluran secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan mengenai peran para pemangku kepentingan melalui konsep sinergitas dengan menggunakan prinsip pengkoordinasian yang dibangun. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada gambaran sinergitas para pemangku kepentingan dalam kerangka pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Kasultanan Banten. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data model Milles dan Huberman, di mana terdapat tiga aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Stakeholders

Suatu organisasi dan lingkungannya memiliki sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Kuatnya hubungan korporasi, diantara organisasi dan lingkungannya maka akan semakin baik bisnis korporasi yang dilakukan. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi yang dibangun maka akan semakin sulit pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Aspek yang mempengaruhi kekuatan hubungan antar para pemangku kepentingan adalah didasarkan kepada tingginya kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama.

Stakeholders dalam kegiatan pengembangan ekonomi kreatif di

Kawasan Kasultanan Banten dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok antara lain :

1. *Stakeholders Primer*

Stakeholders primer merupakan *stakeholder* yang terkena dampak langsung baik dampak positif maupun dampak negative dari suatu rencana serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut, diantaranya masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Kasultanan Banten, Pedagang PKL serta wisatawan.

2. *Stakeholders Kunci*

Stakeholders kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan dalam hal pengambilan kebijakan. Didalam penelitian ini *stakeholder* kunci adalah *stakeholder* yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang diantaranya Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang dan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang.

3. *Stakeholders Sekunder* atau Pendukung

Stakeholders pendukung merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar proses pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Kasultanan

Banten diantaranya Forum Ekonomi Kreatif Kota Serang, LSM Lembaga Peduli Banten Lama, dan Paguyuban Pedagang Kawasan Kasultanan Banten.

Peran Stakeholders

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, peneliti menganggap perlu untuk melakukan penjabaran peran pemangku kepentingan yang telah dipetakan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata Provinsi Banten memiliki peran dalam urusan pemerintahan bidang ekonomi kreatif dengan peran melakukan perencanaan pedoman pengembangan ekonomi kreatif, menyusun bahan kebijakan teknis serta operasional, melakukan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif, melakukan inventarisasi data dan informasi pengembangan sampai kepada melaksanakan penyelenggaraan festival serta event ekonomi kreatif didalam maupun diluar daerah (*Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah*).
2. Dinas Koperasi UKM Provinsi Banten merupakan pelaksana urusan

pemerintahan pemberdayaan usaha kecil menengah yang berkaitan dengan bidang pengembangan usah ekonomi kreatif pada skala provinsi dengan melakukan peran melakukan koordinasi pengembangan usaha kecil, pengembangan kewirausahaan, merancang akses pasar, pengembangan SDM, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil (*Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah*),).

3. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang ekonomi kreatif di Kota Serang dengan peran melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif, menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi

- kreatif, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi kreatif, perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi di bidang permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif (*Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Serang*, n.d.).
4. Dinas Koperasi KUKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang usaha kecil menengah yang berkaitan dengan usaha ekonomi kreatif di Kota Serang dengan peran melaksanakan koordinasi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah, mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro kecil dan menengah, pembinaan dan bimbingan teknis anggota usaha mikro kecil dan menengah, kemitraan antar usaha mikro kecil dan menengah dan badan usaha lainnya, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, serta mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro kecil dan menengah (*Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang*, n.d.).
 5. Forum Ekonomi Kreatif Kota Serang merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif dengan peran memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam formulasi kebijakan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing daerah, mengkoordinir instansi/lembaga/pelaku usaha ekonomi kreatif di wilayah Kota Serang, memfasilitasi pengembangan UKM melalui klaster/sentra ekonomi kreatif, meningkatkan kreatifitas masyarakat dan inovasi dalam pengembangan ekonomi kreatif di tingkat Kota Serang dan memfasilitasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam rangka memperkuat jejaring usaha baik dunia usaha nasional maupun internasional,
 6. Organisasi kemasyarakatan Lembaga Peduli Banten Lama merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk membantu mengawasi kinerja pemerintah dan wadah penyalur

aspirasi atas hak dan kewajiban warga negara dengan peran menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat, menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan, ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan, ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat serta wadah penyalur aspirasi atas hak dan kewajiban warga negara.

Sinergitas

Sinergitas pemangku kepentingan dalam kerangka pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang dapat ditinjau melalui pelaksanaan prinsip-prinsip koordinasi efektif sebagaimana teori Mary Parker Follet.

Prinsip koordinasi pada tahap awal (*early stages*), pada dasarnya sudah dapat dijalankan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Dinas Koperasi UKM Provinsi Banten, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang dan Dinas Koperasi KUKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang melalui tahapan perencanaan program kegiatan baik rencana tahunan maupun lima tahunan. Sehingga proses

perencanaan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi secara langsung (*direct contact*) diantara para pemangku kepentingan walau hanya untuk kebutuhan implementasi program kegiatan semata.

Namun demikian, tidak adanya organisasi perangkat daerah yang secara khusus menangani dan bertanggung jawab secara penuh di bidang ekonomi kreatif berakibat pada tidak ada sinkronisasinya serta lemahnya kolaborasi perencanaan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif tingkat provinsi maupun tingkat kota. Hal ini berakibat tidak dapat tercapainya prinsip koordinasi yang bersifat hubungan timbal balik diantara para pemangku kepentingan (*reciprocal relating*). Tahapan perencanaan program kegiatan seringkali terkendala seberapa penting skala prioritas sektor yang akan dibiayai akibatnya aspek keberlanjutan program (*continuing process*) dianggap belum merupakan hal penting dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif. Koordinasi akan berjalan dengan efektif jika kerjasama yang dilakukan diantara pemangku kepentingan memiliki tujuan yang jelas yang telah disepakati secara bersama-sama. Maka sinergitas yang dilaksanakan oleh berbagai pihak memiliki arah tujuan yang hendak dicapai untuk kepentingan bersama.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan tidak dapat sepenuhnya menjalankan peran koordinasi yang efektif. Prinsip koordinasi pada tahap awal (*early stages*) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan program kegiatan pemangku kebijakan yang secara bersamaan juga dilakukan koordinasi secara langsung (*direct contact*) oleh pemangku kebijakan yang memiliki tanggung jawab terkait pengembangan ekonomi kreatif. Namun belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti oleh adanya hubungan timbal balik diantara para pemangku kepentingan (*reciprocal relating*) sehingga aspek pembiayaan prioritas menjadi kendala pada proses keberlanjutan kebijakan (*continuing process*).

Kondisi ini mencerminkan posisi sinergitas yang dibangun diantara pemangku kepentingan dalam kerangka pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang belum berjalan secara optimal.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, saran dan rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah dalam rangka implementasi program

kegiatan serta penyelesaian berbagai permasalahan pengembangan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi Banten maupun Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Serang dapat membentuk suatu forum kolaborasi antar berbagai pihak (*collaborative governance*) melalui model kerjasama *pentahelix*. Maka dengan adanya kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat madani dan media massa diharapkan dapat saling berinteraksi secara sinergis sehingga dapat mewujudkan sebuah kebijakan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ekonomi Kreatif dan BPS. (2017). *Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif*.
- Campbell Andrew & Kathleen Summers Luchs. (1998). *Strategic Synergy*. International Thomson Business Press. <https://archive.org/details/strategicsynergy0000unse>
- Covey, S. R. (2004). *The Seven Habits of Highly Effective People*.
- Dinas Pariwisata Provinsi Banten. (2021). *Laporan Data Pariwisata Daerah Provinsi Banten*. <http://simparda.bantenprov.go.id>
- Dwinugraha, A. P. (2017). Sinergitas Aktor Kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 2(1), 1–7.

- Fox, E. M. & L. U. (1982). *Dynamic Administration The Collected Papers of Marry Parker Follett*. Hippocrene Books. Inc .
<https://archive.org/details/dynamicadministr0000foll/page/330/mode/2up?view=theater>
- Hayati, N. (2014). Sinergitas Lembaga-Lembaga Pemerintahan/BUMN dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2(4), 3482–3496.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah.* (n.d.).
- Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.* (n.d.).
- Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang.* (n.d.).
- Setyadi, S. dan M. B. S. (2020). Potensi dan Prioritas Industri Kreatif Skala Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1), 118–128.
- Stoner, J. A. F. & C. W. (1986). *Management*. Prentice Hall International Inc.
https://archive.org/details/management000ston_m9h9/page/n3/mode/2up?view=theater
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (10th ed., Vol. 10). CV. ALFABET.